

**ANALYSIS OF ACCRUAL BASED ACCOUNTING IMPLEMENTATION BASED
ON PP NO 71 OF 2010 IN THE OFFICE OF FOOD AND HORTICULTURE KAB.
GOWA**

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN
PP NO 71 TAHUN 2010 PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KAB. GOWA**

DEWI SARTIKA

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Makassar
Jl. A. P. Pettarani Kampus Gunung Sari Baru Makassar
Email: Dewisartikam1106@gmail.com

SUMMARY

This study aims to determine the implementation of accrual-based accounting based on PP Number 71 Year 2010 at the Department of Food and Horticultural Gowa Regency. This research variable is accrual-based accounting based on PP Number 71 Year 2010. Data collection was carried out using interviews and documentation in the form of financial reports and supporting reports. Data analysis was performed using comparative descriptive analysis. The results of this study indicate that the Department of Food and Horticultural Plants of Gowa Regency in presenting the financial statements has not applied thoroughly PP No. 71 of 2010.

Keywords : Implementation, PP Number 71 Year 2010, Financial Statements

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa. Variabel penelitian ini adalah akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara serta dokumentasi berupa laporan keuangan dan laporan pendukungnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa dalam menyajikan laporan keuangan belum menerapkan secara menyeluruh PP Nomor 71 Tahun 2010.

Kata Kunci : Implementasi, PP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Berdasarkan sistem akuntansi terdapat dua basis yaitu basis kas dan basis akrual dimana kedua basis tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Basis kas mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil, dan objektif. Dalam penerapan basis kas, pendapatan dicatat saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Namun basis kas kurang mencerminkan kinerja secara keseluruhan, baik tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan aktifitas yang tidak dapat diukur dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pencatatan yang menyajikan laporan keuangan pemerintah secara akuntabel, transparan, dan lengkap untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi yang transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Basis akrual dibutuhkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya menuntut adanya keterbukaan informasi publik dimana pemerintah harus mengungkapkan informasi mengenai pencapaian hasil pembangunan, pengelolaan keuangan negara, pencapaian target kinerja pemerintah, dan segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel.

Penerapan SAP berbasis akrual diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun mengingat kesiapan berbagai

perangkat yang ada pada unit kerja di seluruh tingkat pemerintahan, maka pelaksanaan dilakukan secara bertahap yaitu dengan penerapan SAP berbasis kas menuju akrual paling lambat empat tahun setelah tahun anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 dan SAP berbasis akrual secara penuh sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 mulai tahun 2015. Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum dan hal tersebut juga berarti bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran baik pemerintah pusat maupun daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan laporan keuangan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan data awal yang diperoleh, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam mengelola keuangan dan masih terdapat ketidaksesuaian dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada laporan keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Gowa yang disajikan seperti adanya ketidaksesuaian saldo akhir dalam laporan perubahan ekuitas dengan neraca dan pencatatan persediaan masih dilakukan dengan sistem periodik bukan perpetual.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gowa khususnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang wajib menerapkan SAP berbasis

akrual. Adapun judul penelitian ini adalah **“Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Gowa”**

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

1. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi dimana suatu transaksi atau peristiwa ekonomi yang diakui pada saat terjadinya, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
2. PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah peraturan perundang-undangan tentang SAP di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual

a. Aspek Komunikasi

Agar PP Nomor 71 Tahun 2010 dapat diketahui dan dilaksanakan, maka dilakukan sosialisasi kepada seluruh penyusun laporan keuangan. Seluruh informan dan dokumentasi dari situs resmi Pemda maupun SKPD mengakui bahwa sosialisasi akrual telah dilakukan. Sosialisasi tersebut dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, salah satu kekurangan sosialisasi ini adalah komunikasi yang dilakukan fokus kepada penggunaan aplikasinya sehingga kurang paham terkait apa itu sebenarnya SAP berbasis akrual. Di luar aturan main dan pedoman teknis untuk menerapkan SAP berbasis akrual, semua informan sepakat bahwa kebijakan akuntansi berbasis akrual diterapkan saat ini belum mencerminkan praktik akuntansi berbasis akrual. Mereka mengatakan bahwa pengakuan dan pencatatan atas pendapatan LO, beban, dan aset dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran ke dan dari kas daerah. Pelaksanaan akrual hanya dilakukan pada saat pelaporan dengan melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Praktik tersebut dapat menimbulkan risiko tidak tercatatnya seluruh hak dan kewajiban pemerintah yang layak diakui sebagai aset, pendapatan, dan beban dalam suatu periode akuntansi.

b. Aspek Sumber Daya

Unit yang terkait dalam penerapan SAP berbasis akrual adalah Kasubag Keuangan berlatar belakang pendidikan sarjana teknologi pertanian dan Sub Bagian Keuangan yang terdiri dari tiga orang pelaksana tersebut, satu diantaranya memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang ekonomi. Sedangkan dua orang lainnya bukan berlatar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi dan diberikan tanggung jawab sebagai penyusun laporan keuangan. Oleh karena itu secara kompetensi, sebagian besar pelaksana kebijakan tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang ekonomi atau akuntansi.

Dalam penerapan SAP berbasis akrual, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura telah menggunakan teknologi informasi yaitu SIMDA dari BPKP. Aplikasi ini merupakan aplikasi baru yang digunakan dalam implementasi akuntansi berbasis akrual di tahun 2015. Walaupun telah digunakan lebih dari dua tahun, namun

aplikasi tersebut masih memiliki beberapa kendala diantaranya pengendalian dalam aplikasi persediaan dan masih terdapat kesalahan penempatan akun.

Dalam rangka mendukung penerapan SAP berbasis akrual, para informan mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan sudah cukup. Berdasarkan hasil observasi, sarana dan prasarana yang disediakan antara lain satu buah meja, kursi, satu buah perangkat komputer yang memadai, satu buah laptop, satu buah alat *scanner*, dan satu buah printer.

2. Implementasi SAP Berbasis Akrual

a. Neraca

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya seperti tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan lain-lain. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Namun dalam praktiknya, Neraca Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak terdapat transaksi investasi, rincian dana cadangan serta terdapat unsur persediaan dalam Neraca yang tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan hasil observasi, ketidaksesuaian antara praktik dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada akun persediaan terjadi dalam proses pencatatan. Dalam praktiknya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan pencatatan persediaan secara periodik setiap akhir bulan. Sedangkan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, persediaan seharusnya dicatat secara perpetual. Keterlambatan pengakuan tersebut akan menimbulkan risiko tidak tercatatnya sebagian aset pemerintah. Sehingga mengakibatkan data persediaan menjadi tidak akurat. Praktik tersebut juga dapat meningkatkan risiko terlambatnya pemesanan kembali barang persediaan yang

akan habis sehingga dapat menghambat kegiatan operasional.

b. Laporan Operasional

LO disajikan pertama kali pada tahun 2015 oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, berarti bahwa laporan keuangan yang disajikan berbasis akrual. Sesuai dengan PSAP 012 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, LO merupakan laporan keuangan yang menyajikan pos-pos berikut:

1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional

Dalam laporan keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak terdapat pendapatan tahun 2017.

2) Beban dari kegiatan operasional

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura telah menyajikan beban sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 yakni terdiri dari:

- a) Beban Pegawai-LO;
- b) Beban barang dan jasa;
- c) Beban hibah;
- d) Beban bantuan sosial;
- e) Beban penyusutan dan amortisasi.

3) Surplus/defisit-LO

c. Laporan Perubahan Ekuitas

LPE juga merupakan komponen laporan keuangan yang diamanatkan oleh PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang wajib disusun pada tingkat SKPD. Dalam penyusunan LPE, fungsi akuntansi harus menyusun LO terlebih dahulu. Hal ini karena dalam LPE terdapat akun surplus/defisit LO yang dapat diperoleh jika LO sudah selesai.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam penyusunan LPE menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1) Ekuitas awal;

- 2) Surplus/defisit yang dihasilkan oleh LO;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi mendasar.
- 4) Ekuitas akhir.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki satu akun tambahan yaitu kewajiban untuk dikonsolidasikan pada PSAP 01 Paragraf 85 menyatakan bahwa “Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE” tetapi pada praktiknya saldo ekuitas Neraca berbeda dengan saldo pada LPE yaitu saldo akhir pada LPE sebesar Rp63.883.309.942,03 sedangkan dalam laporan Neraca sebesar Rp39.961.035.199,03.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa ketidaksesuaian pada penyajian laporan keuangan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 seperti pencatatan akun persediaan, tidak terjadinya transaksi investasi dan dana cadangan, serta tidak adanya keterangan terkait pengakuan aset lancar yang telah diatur dalam PSAP 01 Paragraf 61, 62, 65, 67, dan 69.
2. Pada penyajian Laporan Operasional terdapat satu ketidaksesuaian pada PSAP 12 Paragraf 58 yang menjelaskan transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi tetapi pada LO Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak terdapat transaksi pendapatan dan dalam transaksi beban, antara barang/jasa dengan beban hibah dituliskan nama akun itu sendiri.
3. Laporan Perubahan Ekuitas terdapat satu akun tambahan yaitu kewajiban untuk dikonsolidasikan serta pada PSAP 01 Paragraf 85 menyatakan bahwa “Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE” tetapi pada praktiknya saldo ekuitas Neraca berbeda dengan saldo pada LPE yaitu saldo akhir pada LPE sebesar Rp63.883.309.942,03 sedangkan dalam laporan Neraca sebesar Rp39.961.035.199,03.
4. Dari kesimpulan di atas menggambarkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menyajikan laporan keuangan belum menerapkan secara menyeluruh PP Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa sebaiknya perlu adanya pengevaluasian kembali SAP Berbasis Akrua agar dapat dilakukan penyesuaian laporan keuangan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010, sebagai berikut:
 - a. Pencatatan persediaan secara perpetual;
 - b. Tambahkan keterangan terkait pengakuan aset lancar;
 - c. Untuk transaksi beban, antara barang/jasa dengan beban hibah dituliskan dengan akun yang sama yaitu beban barang/jasa;
 - d. Saldo ekuitas di neraca harus sesuai dengan saldo akhir ekuitas pada LPE.
2. Selain itu, perlu adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa mengenai SAP berbasis akrual, misalnya sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan *training*

atau pelatihan berkaitan dengan SAP berbasis akrual. Hal ini dapat memudahkan Dinas dalam menyusun laporan keuangan yang lebih berkualitas.

3. Untuk peneliti selanjutnya jangan terfokus pada hasil laporan keuangan, sebaiknya dapat mengkaji aplikasi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan memperluas ruang lingkup penelitian bukan hanya di SKPD namun juga dapat dilakukan di Pemda, Pemerintah Kota, dan Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. N. (2010). *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* Jakarta Kencana.
- Bastian, I. (2009). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta BPFE.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (3 ed.). Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2014). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: MEDIA.
- Herwiyanti, E., Sukirman, S., & Aziz, F. S. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(1), 13-23.
- Indonesia, K. K. R. (2014). Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual In. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Lamonisi, S. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 223-230.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 1-8.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual.

Pramudiana, A. A. (2017). *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus Di Pemerintahan Kabupaten Cilacap)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Ratmono, D., & Sholihin, M. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Renyowijoyo, M. (2010). *Akuntanssi Sektor Publik: Organisasi Non Laba* (2 ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara.

Yuningsih, A. T. (2018). *Evaluasi Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.